**Kehadiran Tiongkok di Wilayah Laut Tiongkok Selatan dan Dilema Keamanan di Asia Tenggara**

**Galby** **Rifqi Samhudi**

**Program Studi Diplomasi Pertahanan – Universitas Pertahanan Indonesia**

**Abstrak**

*Pada saat ini, kehadiran Tiongkok di kawasan Asia Tenggara dengan pembangunan basis militernya telah memperkeruh suasana terutama bagi negara-negara di sekitaran Laut Tiongkok Selatan. Respon-respon yang ditunjukkan oleh negara-negara yang ada di sekitar kawasan tersebut beragam mengingat perspektif mereka akan ancaman juga berbeda. Unsur dasar yang harus diperhatikan dalam hubungan antara negara adalah kepentingan nasional yang pada prakteknya mencakup keamanan nasional. Dalam lingkup yang lebih luas lagi, kumpulan keamanan negara-negara yang mendiami wilayah tertentu menciptakan konsep keamanan regional yang penyelenggarannya menjadi tanggung jawab kolektif.*

*Dengan adanya kehadiran Tiongkok di Asia Tenggara, negara-negara di kawasan mulai memperketat dan merapatkan barisan keamanannya. Hal ini berimplikasi pada munculnya dilema keamanan dimana keadaan mencekam, meski tanpa kehadiran perang, disebabkan oleh tingkat kewaspadaan negara yang tinggi akibat munculnya potensi ancaman regional.*

*Jika tidak diantisipasi dengan baik, dilema keamanan akan menjadi masalah keamanan selanjutnya bagi wilayah Asia Tenggara yang menjadi wilayah proxy bagi negara-negara besar yang mempunyai kepentingan di kawasan ini.*

**Pengantar**

Artikel ini akan berusaha menjawab beberapa pertanyaan mendasar mengenai fenomena kehadiran Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan dan berbagai respon negara Asia Tenggara akan hal ini. Pertama, **apa yang mendasari aksi Tiongkok di Laut Cina Selatan dan bagaimana Tiongkok melakukan ekspansinya ke Asia Tenggara?** Kedua, **bagaimana respon negara-negara di kawasan Asia Tenggara terhadap aksi Tiongkok tersebut?** Ketiga, **bagaimana dilema keamanan muncul dan bagaimana cara menghadapinya?**

Adapun inti argument dari artikel ini adalah pentingnya keamanan regional yang harus diperjuangkan tanpa mengorbankan kepentingan nasional individu negara-negara yang mendiami wilayah Asia Tenggara. Setiap negara tentu memiliki persepsi dan kemampuan yang berbeda-beda. Dan mereka memiliki pilihan subjektif untuk memilih siapa untuk diajak bekerjasama dan menjalin kesepakatan-kesepakatan yang menguntungkan untuk kepentingan nasionalnya masing-masing. Akan tetapi, usaha-usaha untuk meraih kepentingan nasional tidak akan terrealisasikan jika kondisi wilayah tidak kondusif.

Oleh karena itu, penciptaan keamanan regional yang merupakan tanggung jawab bersama harus diusahakan dengan cara-cara kolektif dan kooperatif. Dengan demikian, *win-win solution* untuk kepentingan nasional dan keamanan wilayah akan dapat diraih.

Pada prosesnya, pertama-tama artikel ini akan menjelaskan tentang teori-teori serta konsep dasar yang berhubungan dengan **kepentingan nasional, keamanan nasional, dan keamanan regional**. Lebih lanjut **kehadiran Tiongkok** di seputaran Asia Tenggara menjadi sub topik pada artikel ini untuk memberikan gambaran awal mula masalah ini terjadi. Pembahasan berikutnya adalah penjelasan tentang **respon beberapa negara di Asia Tenggara**, yang tergabung dalam ASEAN,terhadap kemunculan Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan. Dan pada bagian akhir artikel ini akan memberikan rekomendasi untuk **menanggulangi dilema keamanan regional**.

**Keamanan Nasional, Kepentingan Nasional, dan Keamanan Regional**

**Keamanan** merupakan barang publik yang pengadaannya menjadi tanggung jawab negara. Lebih lanjut lagi, tanggung jawab pelaksanaan program-program keamanan bukanlah hanya semata-mata diemban oleh institusi militer ataupun kementerian pertahanan saja. Seluruh organ negara memiliki fungsi keamanan sesuai dengan tugas utamanya masing-masing.

Untuk memformulasikan kebijakan pertahanan yang efektif dan efisien, penilaian akan ancaman sangat menentukan. Evaluasi ancaman nantinya akan dikombinasikan dengan kapabilitas yang dimiliki sebuah negara dan keadaan domestik serta regionalnya. Dengan kata lain, banyak variabel yang harus dipertimbangkan untuk menciptakan kebijakan keamanan karena hal tersebut merupakan penentu kelangsungan hidup suatu bangsa.

Dalam konteks ilmu negara yang lebih luas, keamanan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari **kepentingan nasional** yang oleh Morgenthau diartikan sebagai “*survival-the protection of physical, political, and cultural identity against encroachments of other nation-state*”. Dari pengertian singkat tersebut dapat dipahami bahwa keamana merupakan bagian besar dan sangat penting di dalam konsep kepentingan nasional.

Menurut Abdul Rashed Moten, kepentingan nasional dapat dibagi menjadi empat kategori; a) primer dan sekunder; b) temporer dan permanen; c) spesifik dan umum; d) saling melengkapi dan saling bertolak belakang. (Moten, 2011)

Kendatipun demikian, kepentingan-kepentingan nasional yang jatuh pada kelompok primer, permanen, dan umum pada prinsipnya mengandung beberapa kesamaan jika dilihat dari negara satu dengan negara yang lainnya. Kepentingan nasional seperti keamanan nasional, persatuan bangsa, pertahanan negara, ideologi dasar negara, dan kesejahteraan umum merupakan hal-hal yang setiap negara pasti akan memprioritaskan hal-hal tersebut pada daftar kepentingan nasionalnya. Pada titik inilah negara-negara di Asia Tenggara harus dapat saling mengerti agar kerjasama antar negara-negara di kawasan bisa terus dilakukan walaupun tetap saja akan ada konflik kepentingan pada proses negosiasinya.

Dengan kehadiran Tiongkok di kawasan Asia Tenggara, negara-negara kawasan diharapkan dapat mengolah sedemikian rupa kepentingan nasional mereka dengan terlebih dahulu membuat prioritas kepentingan. Mereka harus dapat menetapkan standar perhitungan bagaimana sebuah kepentingan dapat diklasifikasikan menjadi sebuah kepentingan permanen atau temporer, primer atau sekunder, spesifik atau khusus, dan seterusnya agar ketika mereka datang ke meja perundingan mereka dapat bernegosiasi dengan partner kerjasama untuk menghasilkan keputusan yang menguntungkan bagi seluruh pihak.

Dengan semakin aktifnya Tiongkok dengan pembangunan basis militernya di kawasan Laut Tiongkok Selatan, negara-negara Asia Tenggara tidak mempunyai pilihan lain selain untuk merapatkan barisan pertahanan negara mereka masing-masing mengingat pertahanan merupakan kepentingan nasional yang utama (primer) dan permanen.

Belum lagi keamanan laut bagi negara-negara yang mempunyai wilayah laut yang langsung berbatasan dengan Laut Tiongkok Selatan yang notabene merupakan kepentingan nasional yang spesifik dan saling melengkapi dengan sektor-sektor lain seperti industri perikanan, jalur pergadagangan laut, pariwisata dan lain sebagainya. Dengan kata lain, bidang strategis suatu negara merupakan hal yang sangat umum dalam skala prioritas utama bagi seluruh negara karena berkaitan dengan berbagai macam sektor penting lainnya yang berkaitan.

Dari sinilah konsep **keamanan regional** mucul ketika sebuah peristiwa yang dianggap sebagai ancaman bagi beberapa negara khususnya yang saling berdampingan secara geografis terjadi. Stabilitas regional merupakan tanggung jawab bersama yang pemeliharaannya juga harus dilakukan bersama-sama.

Dengan adanya ASEAN, negara-negara di Asia Tenggara mempunyai wadah untuk mengaspirasikan kepentingannya yang terganggu dengan aktifitas militer Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan. *Output* kolektif dari ASEAN inilah yang nantinya diharapkan menjadi kesepakatan yang resmi dan tentunya lebih kuat untuk menghadapi justifikasi Negara Tiongkok.

Dikarenakan wilayah yang diklaim Tiongkok merupakan wilayah yang besar, strategis, dan menjadi jalur umum perdagangan antar benua, banyak negara merasa perlu untuk terus mengamati gerak-gerik Tiongkok di wilayah ini. Oleh karena itu, isu ini sudah menjadi pokok persoalan universal yang penanganannya dilakukan oleh dua negara sekaligus atau lebih secara bersama-sama.

**Kehadiran Tiongkok di Kawasan**

Sebetulnya, kehadiran Tiongkok di kawasan ini bukanlah sepenuhnya ancaman bagi negara-negara di Asia Tenggara. Jika dilihat dari sisi komersil, rencana **Jalur Sutera Maritim** (JSM, *the new silk road*)yang dikampanyekan Presiden Xi Jinping, Tiongkok menargetkan untuk memiliki akses ke beberapa titik penting bagi pasar Tiongkok, sumber energi, serta pendukung industri lainnya di luar negeri. Kota-kota pelabuhan yang dirasa penting bagi Tiongkok adalah Kolkata, Colombo, Nairobi, serta beberapa kota pelabuhan di Asia Tengah. Pada akhirnya, JSM tersebut akan dihubungkan dengan jalur ekonomi sutera darat Tiongkok yang membentang sepanjang Rotterdam hingga Xi’an.

Gambar 1: Jalur Sutera Tiongkok

<http://www.cfr.org/asia-and-pacific/building-new-silk-road/p36573>



Dengan ambisi besar tersebut, tidak hanya negara-negara di Asia Tenggara, tapi juga negara-negara di Asia, Afrika, dan Eropa yang dilalui oleh JSM ini juga dapat memanfaatkan tawaran investasi dari Tiongkok untuk membangun berbagai infrastruktur untuk menjadi lebih modern. (Suropati, Sulaiman, & Montratama, 2016)

Untuk merespon fenomena ini, Indonesia melalui Presiden Joko Widodo telah mengemukakan bahwa Indonesia sedang memperbaiki berbagai infrastruktur penopang bisnis dalam negeri agar investor asing tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Hal ini sesuai dengan pidato Presiden Xi Jinping di DPR yang mengungkapkan bahwa Tiongkok siap mendanai proyek-proyek maritim ASEAN melalui Bank Investasi Infrastruktur Asia (Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB) dalam rangka mensukseskan JSM di kawasan Asia Tenggara. (Mandey, 2014)

Akan tetapi, peluang ini tidak boleh ditelan mentah-mentah oleh negara-negara anggota ASEAN. Pertimbangan ekonomi serta politik perlu dikaji secara mendalam karena pada dasarnya tidak ada negara yang sepenuhnya tulus untuk memberi bantuan. Seperti pepatah yang mengatakan “*there is no such thing as a free lunch*”, selalu ada konsekuensi di setiap dana asing yang masuk ke dalam negeri.

Contoh kejadian yang mesti diperhatikan oleh negara-negara di Asia Tenggara adalah ketika Tiongkok memberikan 5 Miliar USD untuk pembangunan Pelabuhan Hambantota di Sri Lanka.

Presiden Mahinda Rajapaksa yang kala itu menjabat akhirnya harus kalah di pemilihan presiden untuk periode keduanya oleh Maithripala Sirisena akibat kegagalannya mengolah bantuan Tiongkok yang disertai dengan dugaan korupsi dan pencemaran lingkungan. Selain itu, dengan diterimanya bantuan tersebut, hubungan Sri Lanka-India pun sempat memanas.

Selain mencoba mendekati Sri Lanka, Tiongkok pun pernah mencoba untuk melakukan kesepakatan dengan Maladewa untuk memuluskan rencana JSM. Akan tetapi, Perdana Menteri Narendra Modi menolak untuk memberikan izin kepada negara manapun untuk membangun basis militer di negaranya. (Chellaney, 2015)

Dengan contoh kejadian yang sudah ada, negara-negara di Asia Tenggara perlu dengan cermat mengamati tingkah laku Tiongkok yang sedang gencar-gencarnya menerapkan politik expansi yang melalui wilayah ini. Pembelajaran yang sudah terjadi di kawasan Asia Selatan, khususnya di Samudera Hindia, dapat menjadi cerminan bagi negara-negara di Asia Tenggara akan ancaman yang mungkin muncul dengan kehadiran Tiongkok. Jika penilaian akan potensi ancaman sudah dilakukan barulah penilainan akan kepentingan nasional yang lainnya selain keamanan nasional seperti ekonomi, industri, infrastruktur, dan teknologi dapat diselaraskan dengan rencana JSM milik Tiongkok.

**Respon Negara-Negara ASEAN**

**Vietnam** sebagai negara yang langsung merasakan dampak ekspansionisme Tiongkok mempunyai sikap yang berubah-ubah dari masa ke masa. Sebagai gambaran, tercatat pada tahun 2014, Vietnam mengajukan *position paper* ke pada PBB atas ancaman Tiongkok di wilayah perairannya. Proposal itu berjudul ‘*Position Paper of Vietnam on China’s Illegal Placement of Haiyang Shiyou 981 Oil Rig in the Exclusive Economic Zone and Continental Shelf of Vietnam*’ yang diajukan pada 28 Mei 2014. (Hien, 2015, p. 22)

Kecaman Vietnam akan aksi Tiongkok di PBB ini sebetulnya merupakan rangkaian protes yang dimulai pada 11 Mei 2014 yang disampaikan Perdana Menteri Vietnam Nguyen Tan Dungdi ASEAN Summit di Myanmar. Lalu dilanjutkan oleh Wakil Perdana Menteri Nguyen Thi Doan pada *Conference on Interaction and Confidence-Building* (CICA) dimana Tiongkok yang menjadi tuan rumahnya. Seluruh pidato yang disampaikan pada forum-forum ini secara umum menjelaskan penolakan Vietnam atas kehadiran Tiongkok di kawasannya. (Hien, 2015, p. 23)

Akan tetapi, semua itu berubah pada periode 2016-2017 dimana Sekjen Partai Komunis Vietnam, Nguyen Phu Trong, mengunjungi Tiongkok lalu diikuti kunjungan PM Nguyen Xuan Phuc dan Sekretaris Permanen Partai Komunis Vietnam. Kesimpulannya, rentetan kunjungan ini dimaksudkan untuk lebih mengeratkan hubungan Vietnam dan Tiongkok yang mempunyai latar belakang politik komunisme. (Doan, 2017)

**Filipina** juga memberikan respon terkait hal ini dimana konflik wilayah Tiongkok-Filipina merupakan yang terpanas di kawasan. (Heydarian, 2015) Terhitung hingga pertengahan tahun 2015, Presiden Xi Jinping yang telah menjadi pemimpin Tiongkok sejak 2012 belum pernah berkunjung ke Filipina untuk membicarakan berbagai isu strategis dan kerjasama di bidang lainnya dengan Presiden Benigno Aquino. Bahkan Menteri Luar Negerinya pun belum pernah berkunjung ke Filipina meskipun negara-negara seperti Vietnam, Jepang, Indonesia, dan negara-negara di Asia Timur dan seputaran Pasifik lainnya sudah pernah disinggahi.

Akan tetapi, semua itu berubah ketika Filipina memiliki presiden baru. Di bawah rezim Duterte, Filipina merubah haluan kerjasama yang tadinya berkiblat ke Amerika menjadi ke Tiongkok. Ini bisa dilihat dari kunjungannya ke Beijing selama empat hari pada Oktober 2016. Pada momen tersebut, Presiden Duterte mengemukakan bahwa Tiongkok-Filipina merupakan kawan secara alamiah dimana latar belakang sejarah menjadikan hubungan antar kedua negara sangat erat. (Campbell, 2016)

Dalam konteks krisis Laut Tiongkok Selatan, Presiden Duterte menyatakan bahwa pendekatan secara diplomasi bilateral merupakan pendekatan yang tepat untuk menyelesaikan sengketa ini. Pandangan seperti ini tentu sangat bertolak belakang dengan sikap presiden-presiden Filipina sebelumnya yang menginginkan penyelesaian secara hukum. Cara seperti ini tentu menjadi prioritas Filipina mengingat Mahkamah Arbitrase Internasional di Den Hague telah memenangkan Filipina atas Tiongkok dalam kasus Laut Tiongkok Selatan. (Campbell, 2016)

Dinamika sikap negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini telah membuat negara-negara *non claimant* seperti **Indonesia** dan **Singapura** harus menentukan posisi mana mereka berpihak.

Jika dulu pengaruh Amerika di Asian Tenggara sangatlah kental dan ketara, sekarang sentuhan kekuatan Tiongkok mulai menarik perhatian negara-negara di kawasan untuk mencari alternatif partner kerjasama termasuk pada sektor keamanan. Tentu saja Amerika tidak tinggal diam. Pada masa pemerintahan Presiden Obama, Amerika memiliki program mengembalikan poros Asia dan *balancer* dari kehadiran Tiongkok di kawasan.

Perang pengaruh antar dua adidaya inilah yang sebetulnya menjadi faktor pendorong dari dilema keamananyang dialami langsung oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dua negara ini mempunyai kekuatan dana yang begitu besar yang dapat menopang berbagai sektor lainnya termasuk pengembangan kekuatan militer. Jika negara-negara Asia Tenggara tidak mampu merespon situasi ini dengan cermat, bukan tak mungkin keamanan kawasan akan menjadi korban proxy kompetisi Amerika dan Tiongkok.

**Penanggulangan Dilema Keamanan di Asia Tenggara**

Bentuk kerjasama keamanan yang mungkin dilakukan di kawasan Asia Tenggara untuk menanggulangi dilema keamanan adalah **komunitas keamanan** (*security community*) dikarenakan sifatnya yang tidak seintensif jenis kerjasama pertahanan jenis lainnya seperti **aliansi keamanan** (*security alliance*). Dengan keamanan yang bukan menjadi prioritas utama ASEAN pada mula terbentuknya, negara-negara anggota ASEAN agak sulit untuk mempunyai suara yang bulat dalam hal-hal seperti kesepakatan keamanan atau pertahanan. Secara teoritis, menurut Amitav Acharya paling tidak ada lima hal yang menjadi ciri khas komunitas keamanan; a) ketiadaan perang; b) ketiadaan perlombaan senjata; c) percobaan formal dan informal untuk menyelesaikan masalah keamanan; d) adanya kerjasama dan integrasi yang fungsional; dan e) perasaan memiliki identitas yang sama. (Acharya, 2001)

Akan tetapi, gaya kerja sama keamanan yang seperti ini mempunyai kelemahan; kurang siap menghadapi ancaman yang datang dari luar anggota komunitas keamanan.

Hal ini bukan berarti untuk membangun iklim diplomasi pertahanan ASEAN cocok untuk menggunakan pendekatan **rezim keamanan** (*security regime*) dimana setiap anggotanya mempunyai persepsi sama akan kehadiran keamanan (*undesirable* war) di kawasan tanpa adanya kepastian apakah anggota yang lain mempunyai keinginan yang sama. (Acharya, 2001)

Pendekatan ini juga sangat rapuh dengan ketiadaan usaha untuk membangun kepercayaan (*confidence building*) dengan negara-negara lain melalui diskusi regional. Oleh karena itu, rezim keamanan hanya memberikan solusi jangka pendek bagi negara-negara ASEAN yang dihadapkan dengan kehadiran Tiongkok di kawasan ini. Mengingat masalah Laut Tiongkok Selatan yang diklaim Tiongkok merupakan isu klasik, maka rezim keamanan dinilai kurang tepat untuk digunakan dalam diplomasi pertahanan untuk menyelesaikan sengketa ini.

Sebetulnya anggota-anggota ASEAN dapat mentransformasi komunitas keamanannya kepada **pertahanan kolektif** (*collective defense*) untuk mengantisipasi ancaman yang datang dari luar komunitas ASEAN yang belum bisa ditanggulangi komunitas keamanan yang saat ini masih dianut. Hanya saja, pertahanan kolektif baru bisa dilaksanakan jika negara-negara anggota ASEAN telah mampu mengolah serta mengklasifikasikan kepentingan nasional dan persepsi mereka akan ancaman.

Lebih lanjut lagi, pertahanan kolektif juga mampu memberikan mekanisme pemberian bantuan kepada salah satu atau lebih anggota komunitas yang mendapat serangan militer oleh pihak luar (di luar dari komunitas ASEAN, dalam hal ini Tiongkok). Meski demikian, konsekuensi dari pendekatan ini adalah ASEAN akan dipandang eklusif oleh negara-negara di luar ASEAN terutama dalam bidang pertahanan meski tak seketat aliansi keamanan. (Acharya, 2001)

Selain kendala pengelolaan kepentingan nasional dan persamaan persepsi ancaman, anggota ASEAN masih mempunyai tantangan lainnya; **ego nasional** sebagai negara yang ‘baru’ merdeka. Jika dilihat secara keseluruhan, negara-negara ASEAN merupakan negara muda yang masih menikmati kemerdekaannya untuk bereksperimen dalam pembuatan kebijakan publik. Hanya Thailand yang tercatat sebagai negara yang tidak pernah mengalami penjajahan ketika negara-negara seperti Malaysia, Indonesia, Vietnam, Filipina dan negara-negara lainnya pernah menderita akibat eksploitasi bangsa penjajahan.

Berbeda dengan negara-negara di Eropa misalnya yang ketika mereka mengadakan negosiasi dalam forum Uni Eropa dapat dengan mudah berkompromi dan menyepakati sebuah kesepakatan dikarenakan kedewasaan mereka dalam menciptakan kebijakan publik.

Satu hal lagi yang harus diingat adalah bagaimana anggota-anggota ASEAN mengakali (dalam makna positif) prinsip **non intervensi** (*non-interference*) yang sudah terlanjur tertanam dalam pada tatanan interaksi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Non intervensi dinilai oleh banyak kalangan sebagai penghalang utama bagi tercapainya kesepakatan-kesepakatan strategis (politik dan pertahanan) dan proses diplomasi pertahanan dikarenakan kedua hal tersebut merupakan isu yang sangat sensitif.

Singkatnya, anggota ASEAN masih harus banyak belajar untuk bagaimana memformulasikan kesepakan kolektif yang mampu menyandingkan kepentingan nasional individual setiap negara dengan kentingan kawasan Asia Tenggara secara keseluruhan. Lebih jauh lagi, jenis kerjasama yang tergolong sensitif di wilayah ini seperti pertahanan dan keamanan harus bisa dilebur menjadi kesepakatan yang bersifat lebih fleksibel lagi demi terselenggaranya keamanan wilayah yang menyeluruh. Jika negara-negara di kawasan ini sudah sepemahaman, maka implikasi negatif dari dilema keamananakan dapat diantisipasi.

**Kesimpulan**

Sebagaimana urgensi keamanan nasional, keamanan regional juga sangat penting demi situasi yang kondusif untuk perkembangan sebuah negara dan misi negara tersebut dalam meraih kepentingannya terutama di kawasan regionalnya.

Pada dasarnya, jika ada sebuah negara di Asia Tenggara yang mampu menandingi kehadiran Tiongkok di kawasan, negara-negara yang tergabung di ASEAN tidak perlu terlalu khawatir. Jika ada negara yang kuat secara finansial dan militer, Tiongkok akan berpikir dua kali untuk mengganggu stabilitas kawasan yang sudah lama terbangun.

Akan tetapi, Singapura yang merupakan salah satu negara yang kuat secara ekonomi tidaklah berdiri sendiri dalam pembangunan kekuatan ekonominya. Belum lagi militer Singapura yang belum bisa dikatakan mandiri. Di lain pihak Indonesia yang diklaim sebagai pemimpin alamiah Asia Tenggara juga masih terlalu sibuk dengan urusan politik domestiknya. Jadilah usaha untuk menjaga ketertiban dan keamanan wilayah di Asia Tenggara tanggung jawab kolektif khususnya bagi negara-negara yang tergabung dalam ASEAN.

Pilihan antara pertahanan kolektif ataupun komunitas pertahanan merupakan solusi alternatif bagi ASEAN untuk menyelesaikan dua masalah sekaligus; menjaga stabilitas regional dan menghadapi kemunculan Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan. Tentu saja masih ada pilihan lain yakni (kembali) menjalin kerjasama dengan kekuatan lama, Amerika. Akan tetapi, pilihan ini malah akan memanaskan dilema keamanan di Asia Tenggara.

Jika ada tetangga yang mau diajak untuk bekerjasama dalam menjaga stabilitas keamanan regional untuk apa mencari kawan jauh yang kehadirannya malah akan memperkeruh suasana? Dengan demikian, pembicaraan-pembicaraan seputaran isu-isu strategis kawasan harus terus dijalin demi komunikasi yang baik antara negara di Asia Tenggara.

# Referensi

Acharya, A. (2001). Constructing a Security Community in Southeast Asia. *Politics in Asia*, 16-18.

Campbell, C. (2016, Oktober 20). *Philippine President Duterte's Bold Move on China Spells Trouble Ahead*. Diakses pada April 30, 2017, dari Time: http://time.com/4538177/philippines-south-china-sea-rodrigo-duterte-xi-jinping-hague/

Chellaney, B. (2015, Agustus 20). *China's Investment in Mahinda Rajapaksa has Backfired*. Diakses pada Desember 19, 2016, dari Hindustan Times: http://www.hindustantimes.com/analysis/china-s-investment-in-mahinda-rajapaksa-has-backfired/story-UHEzLXEXqZsY7BDQgVt0YK.html

Doan, X. L. (2017, Januari 19). *Is Vietnam tilting toward China?* Diakses pada April 28, 2017, dari Asia Times: http://www.atimes.com/vietnam-tilting-toward-china/

Heydarian, R. J. (2015, Agustus 11). *China and the Philippines: Asia’s Most Toxic Relationship*. Diakses pada April 30, 2017, dari Asia & the Pasific Policy Society: https://www.policyforum.net/a-toxic-relationship/

Hien, N. V. (2015, November). Vietnam Foreign Policy: the Rationale of Its Instruments towards China in Solving South China Sea Disputes Since HD-981 Incident in 2014. *Research Paper*. The Hague, The Netherlands: International Institute of Social Studies.

Mandey, A. (2014, November 11). *Membangun Indonesia*. Diakses pada Desember 19, 2016, dari Viva.co.id: http://fokus.news.viva.co.id/news/read/556675-di-ktt-apec-jokowi-ajak-dunia-turut-membangun-indonesiayour

Moten, A. R. (2011). *Introduction to Political Science.* Kuala Lumpur: Cengage Lerning.

Suropati, U., Sulaiman, Y., & Montratama, I. (2016). *Arungi Samudra Bersama Sang Naga.* Jakarta: PT Elex Media Komputindo.